



RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026

<https://bp3d.natunakab.go.id/>

Jalan Batu Sisir-Bukit Arai, Natuna,
Kepulauan Riau, 29783,

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia Nya sehingga Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 dapat tersusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator (tolak ukur) kinerja kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, maka diharapkan dapat dijadikan dasar penyusunan anggaran oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna untuk Tahun 2026 dan melalui dokumen ini pula, pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi secara transparan.

Kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam adanya perencanaan ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026.

Ranai, 24 September 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Natuna



MESTOFA ALBAKRY, SE

19731030 200012 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Hasil Evaluasi Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun Lalu.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	27
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	31
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	32
3.3 Program dan Kegiatan.....	34
3.4 Cascading dan Crosscutting.....	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Rencana kerja dan pendanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2026.	40
BAB V PENUTUP.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024.....	13
Tabel 2.2	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna s/d Tahun 2024.....	19
Tabel 2.3	: Capaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022- 2024.....	26
Tabel 2.4	: Capaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024.....	27
Tabel 2.5	: Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026 dari Pemangku Kepentingan.....	30
Tabel 3.1	: Tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2026.....	33
Tabel 3.2	: Sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2026.....	34
Tabel 3.3	: Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Natuna	35
Tabel 4.1	: Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	: Cascading Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2026.....	38
Gambar 3.2	: Crosscutting Kinerja Program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2026.....	39

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2025 tanggal 22 September 2025, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 57). Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas Merumuskan, mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan serta Riset dan Inovasi Daerah.

b. Fungsi dan kewenangan

Dalam melaksanakan Tugas pokok tersebut Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan serta riset dan inovasi daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila

- f. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- h. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati. Sesuai tugas dan fungsinya.
- j. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- k. melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan penjabaran Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna. Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memberikan gambaran tentang program, kegiatan sub kegiatan yang akan dikerjakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam satu tahun anggaran sekaligus menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna diawali dengan persiapan penyusunan renja, dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Renja, Forum SKPD, dan Penetapan Renja melalui Peraturan Bupati Kabupaten Natuna.

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Persiapan Penyusunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mencakup :

- 1) Penyusunan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja;

- 2) Orientasi mengenai Renja;
- 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja; dan
- 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Aktivitas dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah meliputi :

- 1) Perumusan Rancangan Renja, dan
- 2) Penyajian Rancangan Renja.

Perumusan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mencakup :

- a) Pengolahan data dan informasi;
- b) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu berdasarkan Renstra;
- c) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- d) Telaahan terhadap rancangan awal Renja;
- e) Perumusan tujuan dan sasaran;
- f) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- g) Perumusan kegiatan prioritas;
- h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja;
- i) Penyempurnaan rancangan Renja;
- j) Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan
- k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

3. Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan. Dalam Forum Perangkat Daerah ini rancangan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dibahas, sehingga diperoleh masukan perbaikan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

4. Penetapan Renja SKPD

Pada tahap ini, Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang telah disempurnakan dan sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD Kabupaten Natuna, Renstra Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan Renja Kementerian/Lembaga. Penyusunan Renja mengacu pada Rancangan Awal RKPD, dan memperhatikan dokumen Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2025-2029 serta Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2025 - 2029. Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan RKA dan DPA.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72)
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Eevaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 43);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 55);
20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 274);
21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Sususan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Sususan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 317);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2026 sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ke dalam rencana tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Tujuan

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ke dalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2026;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2026 sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
- Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, berisi tentang Telaahan terhadap
III Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, berisi tentang Program,
IV Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2026

Bab V Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2026.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun Lalu

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2024 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna berjalan dengan baik. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp. 15.128.049.162,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.083.445.402,00 atau sebesar 73,26%.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2024 dan capaian Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.

1. Daftar program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- 1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

- 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- 2) Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

2. Program/ kegiatan/ sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja atau capaian kinerja kurang dari 75% adalah sebagai berikut:
 - a. **Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**, indikator kinerja Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir di RKPD dengan realisasi kinerja sebesar 16,79% dari target kinerja 71% atau tercapai 9,52%.
 - b. **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**, indikator kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi kinerja 85 laporan dari target kinerja 120 laporan atau tercapai 70,83%.
 - c. **Sub Kegiatan Pengadaan Mebel**, indikator kinerja Jumlah Paket Mebel yang Disediakan dengan realisasi kinerja 2 paket dari target kinerja 5 paket atau tercapai 40,00%.
 - d. **Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**, indikator kinerja Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dengan realisasi kinerja 20 Unit dari target kinerja 63 unit atau tercapai 31,74%.
 - e. **Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya**, indikator kinerja Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan dengan realisasi kinerja 0 Unit dari target kinerja 2 unit atau tercapai 0,00%.
 - f. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur**, indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan realisasi kinerja 0 Laporan dari target kinerja 3 Laporan atau tercapai 0,00%.
3. Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan atau capaian kinerja kurang dari 75%:
 - a. Masih Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap usulan prioritas pembangunan.
 - b. Tingginya target kinerja pada penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
 - c. Tidak adanya kepastian anggaran sehingga belanja modal dan monev tidak bisa dilaksanakan.
4. Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut:
 - a. Melakukan pendampingan terhadap pemerintah desa dalam proses penyampaian usulan prioritas masyarakat.
 - b. Melakukan penyesuaian target kinerja pada periode renstra berikutnya tahun 2025-2029 dan penyesuaian target capaian pada tahun anggaran 2026.
 - c. Melakukan Perencanaan dan penganggaran belanja modal dengan memperhatikan prioritas dan ketersediaan anggaran.

- d. Sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024 terlihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Tahun 2024
1	2					3	4	5	6	7
						Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				
	5					Unsur Penunjang Ursusan Pemerintahan				
	5	01				PERENCANAAN				
	5	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	88,40	78,70
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	75,00	94,87
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3
	5	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan Yang Sesuai SOP	Persen	85,00	77,77
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	1
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	42	42
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	69,04

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Tahun 2024
1	2					3	4	5	6	7
	5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	4
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	83	94,27
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12
	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12
	5	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	85
	5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	40
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	80	94,26
	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	63	25
	5	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	0
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	75
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Tahun 2024
1	2					3	4	5	6	7
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	83,00	79,07
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1
	5	01	02			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	Persen	85	98,71
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir di RKPD	Persen	71	12,02
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2	2
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	2
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	4	4
	5	01	02			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	Persen	65	83,33
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keterisian Data Daerah	Persen	92	98,93
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan	Dokumen	3	3

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Tahun 2024
1	2					3	4	5	6	7
							Pembangunan Daerah			
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	Persen	85	90
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	4
	5	01	03			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	93	100
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	94	100
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	8
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	8	8
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	8
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	8	8
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	1
	5	01	03			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian Sumber	Persen	93	96

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Tahun 2024
1	2					3	4	5	6	7
							Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan			
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen	93	100
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	5
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	3
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	93	100
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	3
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	3	0
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	3	3
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
	5	05	02			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	30	25
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan	Persen	100	100

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Tahun 2024
1	2					3	4	5	6	7
	5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	1	1
	5	05	02			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	60	45,10
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100	100
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	1

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna s/d Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target akhir Renstra	Realisasi sampai Tahun 2024	Capaian terhadap target akhir Renstra
1	2					3	4	5	6	7
						Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				
	5					Unsur Penunjang Ursusan Pemerintahan				
	5	01				PERENCANAAN				
	5	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Laporan LKJIP	88,50	78,70	88,92
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	85	94,87	111,61
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	8	66,66
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18	12	66,66
	5	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan Yang Sesuai SOP	90	77,77	86,41
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1	100,00
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	42	70,00
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	69,04	72,67
	5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	0	0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target akhir Renstra	Realisasi sampai Tahun 2024	Capaian terhadap target akhir Renstra
1	2					3	4	5	6	7
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	4	16,00
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	85	94,27	110,90
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	48	80,00
	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	48	80,00
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	48	80,00
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	48	80,00
	5	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5	3	60,00
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	644	305	47,36
	5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200	40	20,00
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	85	94,26	110,89
	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	5	25,00
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	25	125,00
	5	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	3	0
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	75	75,00
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	48	80,00
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	48	80,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target akhir Renstra	Realisasi sampai Tahun 2024	Capaian terhadap target akhir Renstra
1	2					3	4	5	6	7
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	48	80,00
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	85	79,07	93,02
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	5	83,33
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	15	75,00
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100,00
	5	01	02			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	87	98,71	113,45
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir di RKPD	74	12,02	16,93
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5	4	80,00
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	6	4	66,66
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	6	4	66,66
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	12	8	66,66
	5	01	02			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	67	83,33	124,37
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keterisian Data Daerah	95	98,93	103,15
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	18	9	50,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target akhir Renstra	Realisasi sampai Tahun 2024	Capaian terhadap target akhir Renstra
1	2					3	4	5	6	7
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	75	90	120,00
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	24	16	66,66
	5	01	03			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	94	100	106,38
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	96	100	104, 16
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	40	24	60,00
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	40	24	60,00
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	40	24	60,00
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	40	24	60,00
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	6	4	66,66
	5	01	03			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian Sumber	94	96,00	102,12

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target akhir Renstra	Realisasi sampai Tahun 2024	Capaian terhadap target akhir Renstra
1	2					3	4	5	6	7
							Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan			
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	93	100	107,52
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25	15	60,00
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25	15	60,00
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	93	100	107,52
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15	9	60,00
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	15	3	20,00
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	15	9	60,00
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
	5	05	02			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	40	25	62,5
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan	100	100	100,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target akhir Renstra	Realisasi sampai Tahun 2024	Capaian terhadap target akhir Renstra
1	2					3	4	5	6	7
	5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	5	3	60,00
	5	05	02			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	65,0	45,10	69,38
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	100	100	100,00
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	5	3	60,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan *bottom-up* dan *top down*, yang dikenal dengan istilah *shopping list key working plant*. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah yang mempunyai fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tujuan dan sasaran yang akan di capai, sebagai berikut :

a. Tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima Terwujudnya

b. Sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan
4. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Untuk lebih jelasnya, pencapaian indikator-indikator sasaran tersebut diuraikan dalam tabel capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024 .

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun 2022 - 2024

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target			Realisasi			Capaian		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LAKIP	73,48	78,00	79,50	80,00	73,45	78,70	78,70	94,17	98,94	98,37
		Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	6,3	6,5	7,5	7,9	7,4	7,6	7,8	98,65	101,33	98,73
			Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah	1,8455	2,8155	2,8255	2,9155	2,63	2,72	2,72	93,41	96,27	93,29
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,46	3,46	3,47	3,48	3,23	3,23	3,32	93,35	93,08	95,40

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Analisis Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal-hal Kritis terkait Pelayanan Daerah

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi utamanya dalam upaya menunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dengan sangat baik. Hal tersebut tercermin dalam capaian indikator yang menjadi tanggungjawab Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Pencapaian indikator Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 sangat tinggi, ditunjukkan oleh tabel berikut :

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Pelayanan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LAKIP	Nilai	73,48	78,70	98,37
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	6,3	7,8	98,73
3	Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	1,8455	2,72	93,29
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,46	3,32	95,40

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran ber kriteria sangat memuaskan, dengan rata-rata capaian sebesar 96,60%.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi hasil pembangunan daerah
- 2) Belum optimalnya implementasi perencanaan sektoral dan berbasis isu strategis
- 3) Kurang efisiennya pengelolaan kegiatan dan anggaran yang mengarah kepada peningkatan kinerja kelembagaan
- 4) Belum optimalnya integrasi dan validitas data perencanaan pembangunan
- 5) Adanya refocusing anggaran yang membuat beberapa sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya pagu dana
- 6) Belum terpenuhinya kebutuhan hasil penelitian dan pengembangan untuk menunjang kinerja pembangunan daerah.

2.3.3. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan penyusunan prioritas pembangunan dengan prinsip money follow program;
- b. Perumusan kebijakan berbasis riset
- c. Mewujudkan sinergitas perencanaan sektoral dan kewilayahan
- d. Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran di internal pemerintah daerah maupun dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Pusat
- e. Mewujudkan sinergitas kebijakan dan tata kelola perencanaan pembangunan dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Pusat
- f. Perkembangan peraturan dan kebijakan pembangunan nasional yang berubah-ubah menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga tercipta sinergitas pembangunan.
- g. Perubahan dinamika di tingkat nasional dan dunia yang terus berubah menuntut Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan Kabupaten Natuna yang komprehensif dan mampu mengantisipasi perkembangan dinamika di tingkat nasional dan global

Peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya dukungan dari berbagai pihak untuk menyusun dokumen

perencanaan yang baik.

- b. Tersedianya sarana sistem informasi yang berbasis elektronik dalam perencanaan.
- c. Banyaknya bimbingan teknis dan pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas aparatur perencana
- d. Banyaknya lembaga penelitian atau penyedia jasa yang dapat membimbing dan mengarahkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara baik, sehingga dihasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan selaras dengan dokumen perencanaan di tingkat daerah maupun nasional
- e. Adanya regulasi yang mengatur penguatan penelitian dan pengembangan

- 2.3.4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra. Beberapa isu penting penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna sebagai berikut :

- a. Optimalisasi koordinasi dan perencanaan serta konsultasi pada berbagai aspek yang terkait dengan fungsi perencanaan pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah atau stakeholder terkait lainnya
- b. optimalisasi kualitas perencanaan pembangunan di seluruh bidang untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna.
- c. Optimalisasi manajemen kinerja dan kualitas SDM yang memiliki komitmen, kompeten, handal dan responsif;

- d. Optimalisasi kualitas manajemen dan sistem perencanaan pembangunan yang berkualitas dan inovatif;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Natuna tahun 2026, secara umum telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program, kegiatan dan subkegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pada tahun 2026 tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan khususnya di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026
dari Pemangku Kepentingan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, Negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia Internasional, Negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045 adalah:

1. Pendapatan per kapita setara dengan Negara maju
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat
5. Penurunan intensitas emisi GRK menuju *net zero emission*.

Dalam RPJPN Tahun 2025-2045 telah dirumuskan strategi besar untuk Mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda pembangunan, diantaranya:

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
5. Supermasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara Negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan dengan lebih mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga mencerminkan adanya prioritas program dan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, program serta kegiatan.

Tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya secara kolektif menggambarkan arah strategisnya dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna adalah Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Pelayanan Publik dengan

indikator tujuan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun 2026

MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi			
Tujuan	Indikator Tujuan	Rumus Perhitungan	Target
Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Perencanaan	Hasil penghitungan Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Perencanaan	24,56
	Indeks Pelayanan Publik	Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	4,1

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun ke depan. Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran.

Penetapan Sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna untuk periode Renstra 2025-2029, beserta indikator capaiannya diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai. Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun 2026

Sasaran	Indikator	Rumus Perhitungan	Target
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	Penilaian pada komponen Sinergi, Kualitas Perencanaan dan Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	80,00
Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai indeks diperoleh dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui penilaian terhadap aspek inisiatif, implementasi, dan hasil inovasi yang dilaksanakan daerah	43,00
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	LHE Sakip dari Inspektorat Daerah	78
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	4,10

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

- a. Mengarah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan pengembangan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029.
- b. Mengarahkan pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2025-2029.

3.3.2 Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan subkegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur. Anggaran untuk melaksanakan 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2026 secara keseluruhan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026.

Tabel 3.3
Rekapitulasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah (Rp)	Sumber Pendanaan
(1)	(2)	(3)	(4)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	8.968.366.251,00	
	PERENCANAAN	8.733.310.251,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.686.576.251,00	
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.956.000,00	
	▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.347.000,00	APBD
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.609.000,00	APBD
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.614.687.451,00	
	▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.614.687.451,00	APBD
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	289.449.600,00	
	▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.900.500,00	APBD
	▪ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.005.400,00	APBD
	▪ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.748.100,00	APBD
	▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207.795.600,00	APBD
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302.750.100,00	
	▪ Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.092.800,00	APBD
	▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.626.500,00	APBD
	▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	274.030.800,00	APBD
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	465.733.100,00	
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.013.100,00	APBD
	▪ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.050.000,00	APBD
	▪ Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	398.670.000,00	APBD
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.131.812.500,00	
	1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	547.409.500,00	
	▪ Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	547.409.500,00	APBD
	▪ Pelaksanaan Konsultasi Publik	16.500.000,00	APBD

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah (Rp)	Sumber Pendanaan
(1)	(2)	(3)	(4)
	▪ Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	31.310.000,00	APBD
	▪ Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	428.468.000,00	APBD
	2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	59.547.000,00	
	▪ Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	59.547.000,00	APBD
	3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	45.578.000,00	
	▪ Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	45.578.000,00	APBD
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	914.921.500,00	
	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	210.499.000,00	
	▪ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	85.070.000,00	APBD
	▪ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	125.429.000,00	APBD
	2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	488.892.500,00	
	▪ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	142.435.500,00	APBD
	▪ Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	100.511.000,00	APBD
	▪ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	141.364.000,00	APBD
	▪ Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	104.582.000,00	APBD
	3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	215.530.000,00	
	▪ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	122.408.000,00	APBD
	▪ Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	93.122.000,00	APBD
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	235.056.000,00	
	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	77.852.000,00	
	▪ Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	77.852.000,00	APBD
	2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	78.850.000,00	
	▪ Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	78.850.000,00	APBD
	3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	78.354.000,00	
	▪ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	78.354.000,00	APBD
	TOTAL	8.968.366.251,00	

3.4 Cascading dan Crosscutting

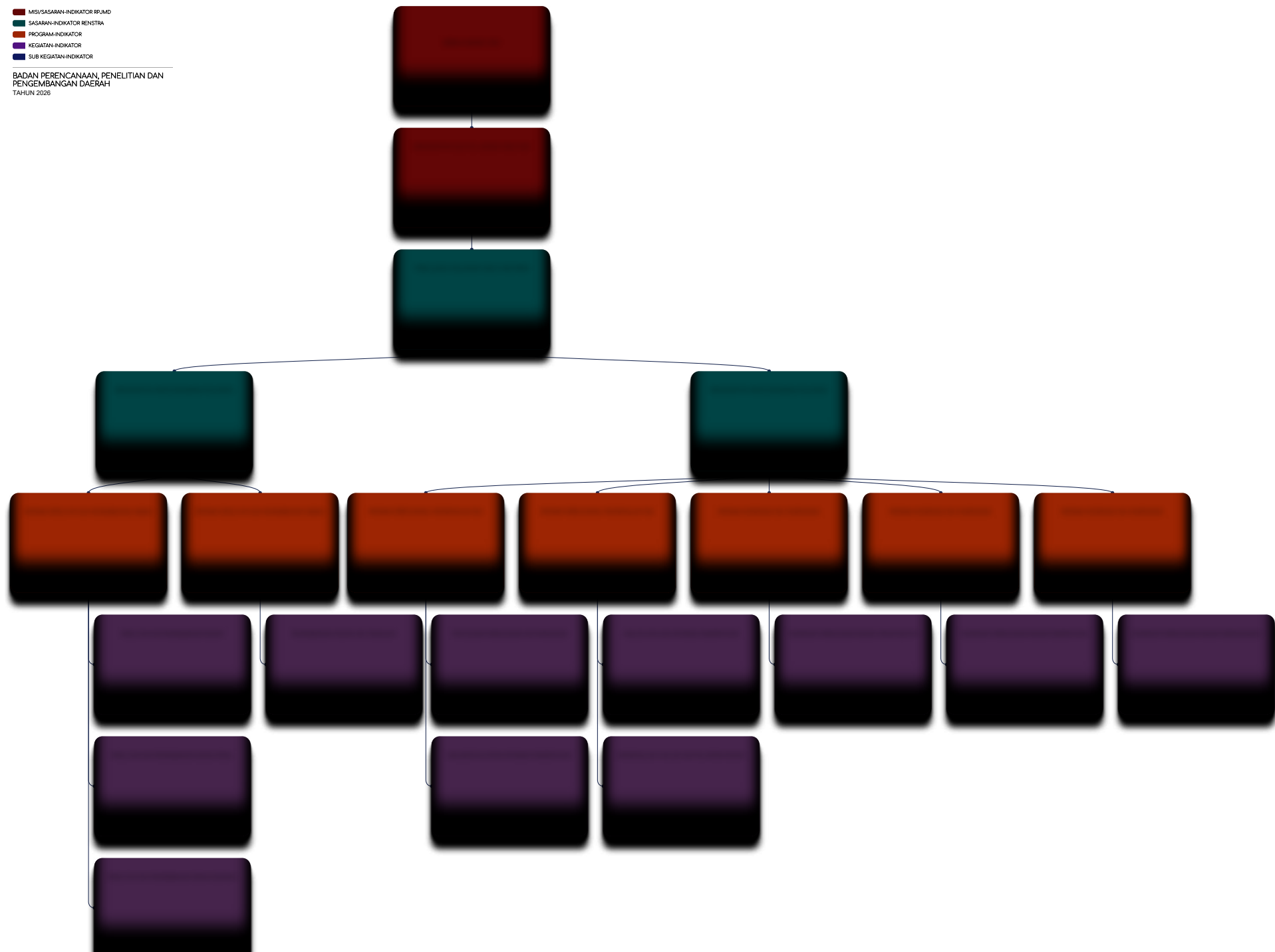
Salah satu sub komponen dalam perencanaan adalah mengukur sejauhmana perencanaan Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).

3.4.1 Cascading

Cascading Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1 Cascading Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2026.

3.4.2 Crosscutting

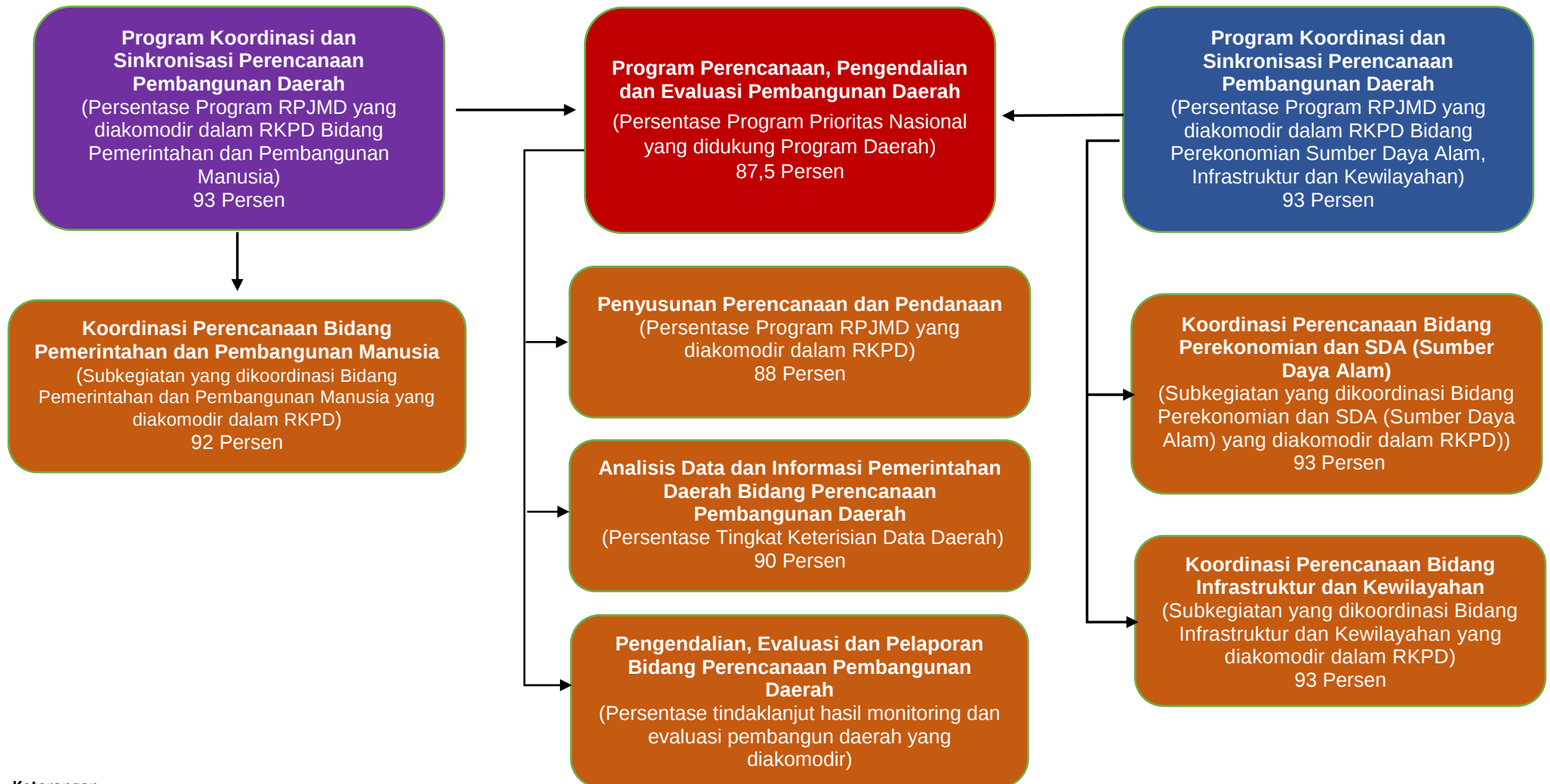
Crosscutting Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2026 menggambarkan pencapaian target kinerja dipengaruhi oleh factor-faktor yang beririsan secara horizontal tidak selalu secara vertical (secara hirarki structural) sehingga dapat mengidentifikasi isu kinerja secara lebih menyeluruh. Bagan Cross Cutting dapat dilihat pada Gambar 3.2 Crosscutting Kinerja Program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2026.



- MISI/SASARAN-INDIKATOR RPJMD
- SASARAN-INDIKATOR RENSTRA
- PROGRAM-INDIKATOR
- KEGIATAN-INDIKATOR
- SUB KEGIATAN-INDIKATOR

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2025

Gambar 3.2
Crosscutting Kinerja Program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun 2026



Keterangan

- : Bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah
- : Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- : Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
- : Kegiatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2026

Rencana kerja dan pendanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 13.956.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 4.347.000,00
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 9.609.000,00

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 5.614.451,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 6.568.521.908,00

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 289.449.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 22.900.500,00
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.005.400,00
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 48.748.100,00
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 207.795.600,00

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 302.750.100 dengan rincian sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 7.092.800,00

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 21.626.500,00

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 274.030.800,00

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 465.733.100,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 64.013.100,00

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 3.050.000,00

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 398.670.000,00

B. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 1.023.687.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Pelaksanaan Konsultasi Publik

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 16.500.000,00

- Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 31.310.000,00

- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 428.468.000,00

- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 547.409.500,00

2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 59.547.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 59.547.000,00

3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 48.578.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 48.578.000,00

C. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 210.499.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 85.070.000,00

- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 125.429.000,00

2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 1.123.657.090,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 142.435.500,00

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 100.511.000,00

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp 141.364.000,00

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp 104.582.000,00

3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 215.530.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp 122.408.000,00

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp 93.122.000,00

D. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp 77.852.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp 77.852.000,00

2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp 78.850.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp 78.850.000,00

3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp 78.354.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp 78.354.000,00

Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan serta Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2026 serta prakiraan maju tahun 2027 tertuang dalam Tabel 4.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026.

Tabel 4.1
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					8.968.366.251,00				10.584.108.283,00
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				8.968.366.251,00				10.584.108.283,00
I	5.01	PERENCANAAN				8.733.310.251,00				9.840.372.00,00
1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSentase CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		88.30 %	13.956.000,00			88.35 %	16.609.000,00
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah		80 %	13.956.000,00			81%	16.609.000,00
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Natuna	2 Dokumen	4.347.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Dokumen	7.000.000,00
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Natuna	3 Laporan	9.609.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 Laporan	9.609.000,00

Rencana Kerja Barenlitbangda Kabupaten Natuna Tahun 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)		3,46 Indeks	8.833.593.908,00			3,47 Indeks	8.065.593.980,00
	5.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	5.614.687.451,00			100 %	5.614.687.451,00
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Natuna	46 Orang/ Bulan	5.614.687.451,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		46 Orang/ Bulan	5.614.687.451,00
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional administrasi umum perkantoran		81 %	289.449.600,00			82 %	347.795.600,00
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Natuna	5 Paket	22.900.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		5 Paket	50.000.000,00
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Natuna	12 Paket	10.005.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Paket	25.000.000,00
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Natuna	5 Paket	48.748.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		5 Paket	65.000.000,00
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

Rencana Kerja Barenlitbangda Kabupaten Natuna Tahun 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		60 Laporan	207.795.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		60 Laporan	207.795.600,00
	5.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan perkantoran		100 %	302.750.100,00			100 %	373.900.000,00
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Kab. Natuna	12 Laporan	7.092.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	12.000.000,00
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kab. Natuna	12 Laporan	21.626.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	36.500.000,00
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Natuna	12 Laporan	274.030.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	325.400.000,00
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		81 %	465.733.100,00			82 %	293.000.000,00
	5.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang</i>	Kab. Natuna	5 Unit	64.013.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		5 Unit	108.000.000,00

Rencana Kerja Barenlitbangda Kabupaten Natuna Tahun 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			<i>Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>							
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Kab. Natuna	5 Unit	3.050.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		5 Unit	35.000.000,00
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	Kab. Natuna	1 Unit	398.670.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
3	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PROGRAM PRIORITAS NASIONAL YANG DIDUKUNG PROGRAM DAERAH		87,5 %	1.023.687.500,00			89 %	1.192.768.460,00
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD		88 %	547.409.500,00			89 %	577.409.500,00
	5.01.02.2.01.07.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD /RPJMD /RKPD)		2 Dokumen	547.409.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Dokumen	577.409.500,00
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Usulan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD		67 %	476.278.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		69 %	615.358.960,00
	5.01.02.2.01.03.	Pelaksanaan Konsultasi Publik								

Rencana Kerja Barenlitbangda Kabupaten Natuna Tahun 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		2 Berita Acara	16.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Berita Acara	21.770.000,00
	5.01.02.2.01.04.	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah								
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah		1 Berita Acara	31.310.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Berita Acara	48.210.000,00
	5.01.02.2.01.05.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota								
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		1 Berita Acara	428.468.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Berita Acara	545.378.960,00
4	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE REKOMENDASI HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIKOMODIR		64 %	105.125.000,00			65 %	398.080.108,00
	5.01.02.2.02.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keterisian Data Daerah		90 %	59.547.000,00			90 %	125.814.308,00
	5.01.02.2.02.01.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)</i>	Kab. Natuna	3 Dokumen	59.547.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 Dokumen	125.814.308,00

Rencana Kerja Barenlitbangda Kabupaten Natuna Tahun 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangun daerah yang diakomodir		60 Persen	45.578.000,00			65 Persen	272.265.800,00
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah								
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>	Kab. Natuna	4 Laporan	45.578.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 Laporan	272.265.800,00
5	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PROGRAM RPJMD YANG DIAKOMODIR DALAM RAKPD BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		93 %	210.499.000,00			93 %	95.897.610,00
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang diakomodir dalam RAKPD		92 %	210.499.000,00			93 %	95.897.610,00
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RAKPD)								
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RAKPD)</i>	Kab. Natuna	8 Dokumen	85.070.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		8 Dokumen	152.596.000,00
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia								

Rencana Kerja Barenlitbangda Kabupaten Natuna Tahun 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD /RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i>	Kab. Natuna	1 Laporan	125.429.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)			243.211.610,00
6	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PROGRAM RPJMD YANG DIAKOMODIR DALAM RKPD BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)		93 %	488.892.500,00			93 %	894.876.660,00
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang diakomodir dalam RKPD		93 %	488.892.500,00			93 %	894.876.660,00
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	Kab. Natuna	5 Dokumen	142.435.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		5 Dokumen	179.300.000,00
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian								
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>	Kab. Natuna	5 Laporan	100.511.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		5 Laporan	173.373.800,00

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Natuna	5 Dokumen	141.364.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		5 Dokumen	295.482.430,00
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA								
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Natuna	5 Laporan	104.582.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		5 Laporan	246.720.430,00
7	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PROGRAM RPJMD YANG DIAKOMODIR DALAM RKPD BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		93 %	215.530.000,00			93 %	246.720.430,00
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang diakomodir dalam RKPD		93 %	215.530.000,00			93 %	246.720.430,00
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir	Kab. Natuna	3 Dokumen	122.408.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 Dokumen	122.408.000,00

Rencana Kerja Barenlitbangda Kabupaten Natuna Tahun 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			<i>Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>							
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur								
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>	Kab. Natuna	3 Laporan	93.122.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 Laporan	190.440.000,00
II	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				235.056.000,00				743.735.394,00
8	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIJADIKAN SEBAGAI LANDASAN DALAM IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DAERAH		55,00 %	156.702.000,00			60,00 %	449.527.264,00
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	<i>Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan</i>		100 %	77.852.000,00			100 %	156.058.994,00
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan								
			<i>Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik</i>	Kab. Natuna	1 Laporan	77.852.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Laporan	156.058.994,00

Rencana Kerja Barenlitbangda Kabupaten Natuna Tahun 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	<i>Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>		100 %	78.850.000,00			100 %	293.468.270,00
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata								
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata</i>	Kab. Natuna	1 Dokumen	78.850.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	293.468.270,00
9	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	RASIO PRODUK INOVASI YANG DIMANFAATKAN PEMERINTAH, MASYARAKAT, INDUSTRI, DAN BADAN USAHA DI DAERAH		0,71	78.354.000,00			0,73	294.208.130,00
	5.05.02.2.0004	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Inovasi Daerah		100 %	78.354.000,00			100 %	294.208.130,00
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif								
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</i>	Kab. Natuna	1 Laporan	78.354.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)			294.208.130,00
Jumlah						8.968.366.251,00				10.584.108.283,00

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis tahun 2025-2029. Program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, serta menghasilkan penelitian dan pengembangan yang bermanfaat guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Natuna tahun 2025-2029.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pajabat struktural di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2026 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2026 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan program, kegiatan subkegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2026.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan program, kegiatan sub kegiatan Renja tahun 2026 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Kepala Badan dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2026 guna memastikan pelaksanaan program, kegiatan sub kegiatan berjalan dengan baik.

Adanya Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan pada urusan perencanaan pembangunan dan urusan penelitian dan pengembangan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan perangkat daerah yang lain. Semoga dengan tersusunnya Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026, mendorong peningkatan kualitas kinerja dapat perannya sebagai perangkat daerah yang menangani urusan Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Penelitian dan Pengembangan.

Selain itu, diharapkan Rencana Kerja tahun 2026 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan dan Rencana Strategis tahun 2025-2029.

Ranai, 24 September 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Natuna



MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 003